

Judul : MKD siap tindak lanjuti kasus Viktor Laiskodat
Tanggal : Kamis, 07 September 2017
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 6

MKD Siap Tindak Lanjuti Kasus Viktor Laiskodat

JAKARTA – Penanganan laporan dugaan ujaran kebencian dan fitnah dengan terlapor Ketua Fraksi Partai NasDem di DPR, Viktor Laiskodat, dinilai berjalan di tempat. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) berencana mengambil alih jika Polri tidak menindaklanjuti kasus tersebut.

MKD selama ini mengalami hambatan untuk menangani laporan pelanggaran kode etik terhadap Viktor karena laporan pelanggaran pidana atas kasus yang sama juga tengah ditangani Bareskrim Polri. MKD sudah menyurati Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian perihal ini, dan dalam waktu dekat juga akan mendatangi Bareskrim Polri untuk berkoordinasi mengenai perkembangan kasus tersebut.

“Kalau polisi enggak menangani, ya kita harus tarik dong, kita (MKD) harus memprosesnya,” ujar Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad di Jakarta kemarin.

Dasco mengatakan, MKD harus menindaklanjuti kasus tersebut karena selama ini banyak pertanyaan yang datang dari masyarakat mengenai penanganannya. “Ada masyarakat yang minta audiensi dengan MKD, tapi MKD tidak bisa memproses laporan karena kasusnya tengah ditangani Polri,” lanjut Dasco.

Viktor dilaporkan ke polisi dan diadukan ke MKD atas pernyataan kontroversialnya yang dinilai berpotensi menimbulkan perpecahan bangsa. Saat berpidato itu di atas mimbar pada acara deklarasi dukungan calon bupati di Tarua, Kabupaten Kupang, NTT, Selasa (1/8), Viktor mengundung empat partai yakni Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat sebagai partai pendukung gerakan intoleran dan pro-khilafah sehingga tidak layak dipilih.

Laporan ke Bareskrim dila-
yangkan oleh PKS, PAN, dan Gerindra. Viktor dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis *juncto* Pasal 8 ayat 2, Pasal 45 ayat 2, Pasal 4, Pasal 16, Pasal

156, serta Pasal 156A UUKUHP.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendesak pihak kepolisian untuk lebih responsif dalam menangani kasus dugaan fitnah yang dilakukan politikus asal daerah pemilihan (dapil) NTT tersebut. Fadli menilai tidak ada perkembangan berarti atas kasus tersebut. “Harusnya polisi lebih responsif terhadap laporan publik. Nanti orang akan menilai *kok* kasus ini mau diusut, tapi yang itu tidak,” kata politikus Partai Gerindra itu di Gedung DPR kemarin.

“Kalau polisi enggak menangani, ya kita harus tarik dong, kita (MKD) harus memprosesnya.”

SUFMI DASCO AHMAD
Ketua MKD

Partai NasDem menolak untuk meminta maaf atas pernyataan kontroversial Viktor. Ketua Tim Kajian kasus Viktor, Zulfan Lindan, menyebut permintaan maaf tak perlu disampaikan lantaran video yang menjadi viral itu merupakan hasil editan sehingga menghilangkan konteks, konten, serta substansi dan pidato aslinya.

Sebelumnya, Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisito berjanji melakukan pemanggilan terhadap Viktor, namun dia juga mengingatkan kendala yang dihadapi Polri. Kendala tersebut yakni hak imunitas yang dimiliki anggota DPR. Jenderal bintang dua ini menjelaskan Polri akan mengkaji lebih dalam apakah pidato yang disampaikan Viktor kapasitasnya sebagai wakil rakyat atau bukan. Dia mengatakan hak imunitas bisa digunakan ketika masih dalam koridor sebagai anggota Dewan dan ketika legislator melaksanakan tugas ke dapilnya.

● **kiswondari/
m yamin**